

Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengelolaan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Studi Kasus Desa Komodo)

Andi Oktami Dewi Artha Ayu Purnama^{1*}, Muhammad Ibrahim²

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding author, e-mail: oktamidewi@iaingorontalo.ac.id.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat lokal Desa Komodo terhadap pengelolaan Taman Nasional Komodo. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena Taman Nasional Komodo menjadi salah satu wisata eksotik yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara namun dengan keindahannya menimbulkan polemik masyarakat lokal terhadap pengelola Taman Nasional Komodo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan teori resistensi dari James C. Scott untuk menganalisis temuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak seluruhnya tunduk terhadap pengelolaan pariwisata di Taman Nasional Komodo. Tindakan resistensi (perlawanan) yang dilakukan oleh masyarakat lokal karena adanya aturan sistem zonasi dan konsevasi namun tidak ada pengetahuan masyarakat tentang sistem zonasi, konsevasi hingga berkaitan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Bentuk resistensi yang dilakukan adalah menyampaikan aspirasi terhadap pengelolaan Taman Nasional Komodo dan masyarakat lokal yang mensiasati pengelolaan Taman Nasional Komodo. Resistensi disini merupakan bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap pengelola Taman Nasional Komodo sekaligus ini juga merupakan bentuk pertahanan masyarakat lokal dalam menghadapi kesulitan hidup dilingkungannya sendiri.

Kata Kunci: Masyarakat lokal; Pariwisata; Pengelolaan; Resistensi.

Abstract

This article aims to explain the resistance carried out by the local community of Komodo Village towards the management of Komodo National Park. This research is interesting to research because Komodo National Park is one of the exotic tourist attractions that attracts local and foreign tourists, but its beauty has caused polemics among local people towards the management of Komodo National Park. This research uses qualitative research with descriptive methods and uses James C. Scott's theory of resistance to analyze the findings. This research indicates that local communities are not entirely subject to tourism management in Komodo National Park. Local communities carried out actions of resistance because of the zoning and conservation system regulations. Still, there was no public knowledge about the zoning system, conservation, and related management of the Komodo National Park. The form of resistance carried out is conveying aspirations regarding the management of Komodo National Park and local communities who are getting around the management of Komodo National Park. Resistance here is a form of local community resistance to the management of the Komodo National Park, as well as a form of local community defense in facing the difficulties of life in their environment.

Keywords: Komodo National Park; Local community; Management; Resistance.

How to Cite: Purnama, A.O.D.A.A. & Ibrahim, M. (2024). Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengelolaan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Studi Kasus Desa Komodo). *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(1), 84-93.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan peningkatan pendapatan melalui penerima devisa. Dengan objek dan daya tarik wisata ini menjadi unsur penting dalam pariwisata, karena dengan keduanya dapat mendukung dan mensukseskan program pemerintah termasuk juga dalam pelestarian adat dan budaya masyarakat setempat (Oktavia et al., 2021). Sektor pariwisata yang menjadi kebanggaan Indonesia salah satunya adalah objek wisata bahari yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki keindahan alam serta keunikan budaya seperti pengetahuan nelayan yang masih tradisional dan memiliki daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke objek wisata bahari di Indonesia (Rahmani, 2022). Sektor pariwisata harus dikelola oleh orang-orang yang ahli, sehingga dapat menggali potensi objek wisata bahari dan para ahli ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas objek wisata bahari sehingga mendatangkan keuntungan dan pendapatan yang besar bagi negara (Zulmi, 2018).

Taman Nasional Komodo merupakan salah satu wisata eksotik yang saat ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara dan Taman Nasional Komodo ini memiliki area luas yang terdiri dari pulau kecil seperti Pulau Kelor, Pulau Bidadari, Pulau Kanawa serta pulau besar seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar. Pulau Komodo dan Pulau Rinca merupakan habitat asli Binatang Komodo yang merupakan hewan endemik Indonesia. Daya tarik utama dalam Taman Nasional Komodo yaitu binatang Komodo atau Naga Komodo yang merupakan reptil raksasa purba dan dengan keaslian dan kekhasan alamnya yang khusus dari panorama savana dan bawah lautnya merupakan daya tarik pendukung yang sangat potensial (Idris et al., 2019). Dari pulau-pulau tersebut diatas hanya Pulau Komodo yang ditinggali oleh masyarakat asli Komodo dari kawasan tersebut. Desa tersebut bernama Desa Komodo yang merupakan desa yang secara langsung merasakan dampaknya dari pariwisata Taman Nasional Komodo (Ziku, 2015).

Taman Nasional Komodo merupakan salah satu obyek wisata andalan yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya. Dalam pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kehutanan, berawal di tahun 2012 daya tarik yang dimiliki kawasan ini menjadikan cikal bakal bertumbuhnya perekonomian di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Taman Nasional Komodo ini juga resmi ditetapkan *New 7 Wonders of Nature* oleh UNESCO dan pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia menggelar *Sail Komodo* yang menjadikan ajang promosi Taman Nasional Komodo kepada dunia (Hironimus et al., 2019). Semakin terkenal Taman Nasional Komodo namun hingga saat ini wisatawan umumnya hanya mengunjungi Taman Nasional Komodo dan tidak mengunjungi Desa Komodo (Muchlashin, 2023). Dinamika tersebut menimbulkan resistensi atau perlawanan dari masyarakat lokal yang dimana mereka tidak diperkenalkan kepada wisatawan. Pembangunan seharusnya memberikan kesejahteraan bagi semua elemen masyarakat tetapi disisi lain justru mengancam budaya masyarakat untuk mengembangkan dan mengekspresikan identitas mereka (Sopacoly, 2019). Resistensi dipahami sebagai respon terhadap perubahan dan kenyataan yang dimana individu dan kelompok menghadapi berbagai tekanan yang sangat membatasi ruang gerak mereka.

Berdasarkan observasi awal dalam Taman Nasional Komodo terdapat kawasan zonasi yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Komodo. Dengan adanya zonasi ini membuat larangan terhadap masyarakat untuk berlayar di kawasan tersebut dengan alasan masyarakat akan merusak kelestarian pulau habitat asli Binatang Komodo tersebut dan masyarakat juga dilarang melintas di beberapa zonasi (Faisal, Nelayan). Penulis mengamati bahwa saat ini masyarakat di Desa Komodo (Pulau Komodo) yang merupakan masyarakat asli dari Taman Nasional Komodo akhirnya banyak yang beralih profesi sebagai pemahat patung dan penjual souvenir, pemerintah juga telah menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menjualkan souvenirnya di area Taman Nasional Komodo tetapi masyarakat masih merasakan pendapatan yang sangat minim, karena terkadang banyak wisatawan yang tidak datang untuk melihat-lihat souvenir bahkan wisatawan diarahkan oleh pemandunya (Guide) lewat jalur lain untuk kembali ke kapalnya sedangkan keinginan masyarakat lokal itu adalah pemerintah seharusnya lebih tegas bagi wisatawan yang berkunjung ke area Taman Nasional Komodo dan harus menjadikan souvenir juga tujuan utama berwisata tetapi apa yang disampaikan oleh masyarakat untuk pemerintah hanya berupa sebuah keinginan, bukan sebagai suatu hal penting yang harus ditindak lanjuti. Hal ini terlihat dari adanya keluhan masyarakat yang masih merasa pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.

Sistem zonasi yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Komodo dibawah Kementerian Kehutanan khususnya telah membuat masyarakat semakin resisten yang mengarah pada sejumlah konflik yang didasarkan pada tiga alasan. Pertama, perluasan sistem zonasi yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Komodo. Kedua, krisis keuangan setelah adanya peraturan yang terkait Taman Nasional Komodo. Ketiga, relokasi masyarakat asli Desa Komodo. Perluasan Kawasan Taman Nasional Komodo dan terbukanya ruang persaingan di pariwisata membuat industri pariwisata memiliki muatan konflik di Taman Nasional

Komodo. Akibat dari komunikasi yang minim antara masyarakat lokal dan pengambil kebijakan mengakibatkan pengelolaan Pariwisata Taman Nasional Komodo belum tercapai secara maksimal. Masing-masing pihak melakukan kegiatannya masing-masing atau secara sendiri-sendiri dan tidak ada sinergi yang positif dari pihak yang berkepentingan tersebut. Terdapat 5 sebab terjadinya perlawanan, yaitu dominasi, marginalisasi, degradasi ekologis, degradasi sosial budaya serta kemiskinan (Fringka, 2016). Dipenelitian ini menunjukkan adanya bentuk resistensi masyarakat lokal di Desa Komodo mulai mengeluarkan aspirasi mereka hingga mensiasati pengelola Taman Nasional Komodo.

Beberapa penelitian yang relevan membahas tentang resistensi telah dibahas oleh sebelumnya diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Suantika (2015) hasil penelitian menjelaskan bahwa elemen-elemen masyarakat yang resistensi terhadap kapitalisme. Penelitian yang dilakukan oleh Nindiananta (2022) hasil penelitian resistensi terhadap kebijakan pengembangan wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Chakim et al (2021) hasil penelitian objek wisata religi dalam upaya pengelolaan berbasis masyarakat memunculkan resistensi. Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dimana penelitian diatas membahas tentang bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat dilihat dalam pengelolaan wisata, resistensi terhadap kebijakan pengembangan desa wisata, dan resistensi terhadap kapitalisme global dan terhadap rencana tambang, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah memahami resistensi masyarakat lokal terhadap pengelolaan yang dimana adanya sistem penerapan sistem zonasi malah akan mengancam sosial ekonomi masyarakat setempat. Diketahui bahwa penerapan sistem zonasi juga harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat bukan berarti menghilangkan atau mengambil alih kendali masyarakat. Berdasarkan uraian fenomena diatas, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk resistensi masyarakat lokal Desa Komodo terhadap pengelolaan Taman Nasional Komodo dan menggambarkan resistensi masyarakat yang berkaitan dengan ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Pulau Komodo, Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ruang lingkup penelitian pada masyarakat di Desa Komodo. Penelitian dilakukan pada Agustus 2022 – Maret 2023. Pemilihan lokasi yang didasarkan pada pertimbangan bahwa ada bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat lokal baik dari internal maupun eksternal dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Dengan kriteria masyarakat lokal Desa Komodo berprofesi nelayan, pemahat pantung dan aktivis lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dengan mengamati proses interaksi masyarakat, sosial budaya dan juga terhadap Taman Nasional Komodo. Selanjutnya melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian yang akan dilakukan yaitu bentuk resistensi masyarakat dan dilakukan dengan waktu yang beragam. Selanjutnya pada tahapan dokumentasi yang berupa foto lokasi Taman Nasional Komodo dan saat wawancara berlangsung. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yang digunakan yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya dan triangulasi metode yang digunakan yaitu mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Pada kesimpulan peneliti mengutarakan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan secara mendalam, observasi dan dokumentasi sehingga dapat menghasilkan data dari permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada masyarakat lokal Desa Komodo akan memberikan tanggapan dan tindakan terhadap resistensi masyarakat lokal pada pengelolaan Taman Nasional Komodo. Resistensi masyarakat lokal yang dilakukan ini dengan adanya kebijakan yang telah diterapkan dan masyarakat mengalami perubahan bahkan terisolir. Hasil penelitian ditemukan berbagai resistensi masyarakat lokal terhadap pengelolaan Taman Nasional Komodo antara lain:

Resistensi Berkaitan Ekologi

Masyarakat lokal Desa Komodo masih mengandalkan mata pencaharian utama pada sumberdaya laut dan hutan dan dengan masuknya Pulau Komodo dalam Kawasan Taman Nasional Komodo membuat keadaan ini berdampak pada sumber pendapatan dan penghasilan ekonomi mereka sehari-hari. Pada akhirnya masyarakat di pedesaan semakin dimarginalitaskan ketergantungannya dengan sumberdaya laut dan hutan. Ketersingkirannya masyarakat setempat terhadap akses pengelolaan sumberdaya alam yang

dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, menjadikan mereka tetap berupaya bagaimana membangun serta menciptakan berbagai bentuk strategi agar tetap bertahan dan eksis di kampung halaman mereka sendiri.

Pada tahun 1980-1988, Kawasan Komodo ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional. Meskipun demikian, penduduk masih diperbolehkan mengelola kebun atau berladang, mencari hasil hutan dan memelihara hewan yang berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI tanggal 6 Maret 1980 yang dipertegas melalui Surat Menteri Kehutanan No. 306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang perubahan fungsi suaka margasatwa Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar seluas 40.728 ha serta penunjukkan perairan laut disekitarnya seluas 132.572 ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Komodo yang ditetapkan sesuai SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang penetapan KPA perairan Taman Nasional Komodo. Kawasan Taman Nasional Komodo diteguhkan lagi dengan SK Dirjen PHKA No. 65/Kpts-DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang zonasi Taman Nasional Komodo yang kemudian mengalami perubahan sesuai SK Dirjen PHK No. SK.21/IV-SET/2012 tanggal 24 Februari 2012. Sejak berbagai regulasi tersebut di atas otomatis membuat seluruh aset masyarakat berpindah tangan atau diambil alih oleh pemerintah dan masyarakat Desa Komodo nyaris dikeluarkan atau direlokasikan ke tempat atau pulau lain oleh pemerintah.

Semenjak sistem zonasi baik di darat maupun di laut mulai ditetapkan dan diterapkan oleh otoritas Taman Nasional Komodo (Balai Taman Nasional Komodo) juga mengakibatkan ruang gerak masyarakat semakin menyempit atau hilang sama sekali. Sistem zonasi yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi keanekaragaman hayati Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga kini masih menjadi sumber konflik baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo. Berikut pemaparan aktivis dari Pulau Komodo yang menyatakan:

“Salah satu persoalan mendasar sekaligus krusial yang selama ini terjadi yakni ketidakjelasan sistem dan batas-batas zonasi yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa musyawarah atau melibatkan masyarakat lokal. Dia mengaku, sejak Kawasan Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai wilayah konservasi, penduduk setempat ibarat manusia hukuman yang setiap gerak gerik mereka dipantau dan diawasi secara ketat. Para nelayan yang beroperasi di Kawasan Taman Nasional Komodo tidak semuanya memahami dan tahu tentang sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah selama ini”. (Aktivis lingkungan, 10 November 2022).

Umumnya masyarakat Komodo mendukung sepenuhnya upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh berbagai *stakeholders* lainnya karena konservasi sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah itu sekaligus untuk menekan atau menghilangkan perilaku buruk dan bersifat destruktif seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau mencuri dan memburu binatang liar yang menjadi makanan Komodo. Namun demikian, sistem zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah dalam praktiknya seringkali tidak jelas, kabur dan membingungkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya batas-batas seperti zona inti, zona penyangga, zona pemanfaatan zona rimba dan zona lainnya.

Sistem zonasi yang diterapkan juga dijalankan secara tidak konsisten oleh pemerintah dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo sebagai lembaga pengelola di lapangan. Bentuk penerapan zonasi oleh Balai Taman Nasional Komodo dalam mengimplementasikan program-programnya terutama yang berhubungan dengan sistem zonasi pengelolaan Taman Nasional Komodo sering diluar dari peraturan yang dibuat. Salah satu misalnya pemerintah yang telah menetapkan Pulau Padar dan Pulau Rinca sebagai daerah zona inti yang artinya di kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas apapun tetapi di kawasan tersebut pada kenyataannya kini sudah dibangun resort dan dermaga untuk kepentingan kepariwisataan dan ini merupakan persetujuan pihak Balai Taman Nasional Komodo kepada investor untuk membangun.

Tanah-tanah milik penduduk tidak diperbolehkan untuk disertifikasi termasuk tempat tinggal mereka dan dengan otoritas Taman Nasional Komodo menggeser perluasan desa dan diberi batasan pagar antara desa dan hutan. Alasan dari pihak otoritas menyangkut tanah dan kepemilikan tempat tinggal karena pulau tersebut merupakan Wilayah Komodo yang menjadi kawasan konservasi sumber daya alam. Ironisnya, ada warga yang masih tetap membayar pajak kepada pemerintah hingga sekarang walaupun tidak memiliki bukti kepemilikan tanah.

Semenjak Balai Taman Nasional Komodo memberlakukan Kawasan Komodo dalam sistem zonasi, masyarakat terkhususnya yang berprofesi sebagai nelayan melakukan perlawanan dengan pihak Balai Taman Nasional Komodo. Keamanan Balai Taman Nasional Komodo seringkali melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap para nelayan tradisional dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak-hak asasi para nelayan tradisional yang berada di Kawasan Taman Nasional. Dengan adanya

peristiwa tersebut, ratusan massa yang terdiri dari nelayan tradisional dan mahasiswa yang berasal dari pulau-pulau didalam dan di sekitar kawasan konservasi melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo dan membuat masyarakat tidak peduli dengan Kawasan Taman Nasional Komodo. Balai Taman Nasional Komodo yang selama ini yang ada, mereka nilai telah melakukan berbagai tindakan yang tidak manusiawi seperti penembakan terhadap para nelayan tradisional di perairan Taman Nasional Komodo tanpa bertanya asal usulnya apakah dari masyarakat dalam Kawasan Taman Nasional Komodo atau bukan. Mereka mendesak pemerintah agar pengelolaan Taman Nasional Komodo tidak sepenuhnya hanya diatur oleh pemerintah pusat karena tidak mensejahterakan warga setempat.

Dalam hal ini proses pemberdayaan masyarakat lokal sangat penting dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat nelayan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup di wilayah itu. Upaya pemberdayaan itu penting dilakukan mengingat banyak penduduk di Kawasan Taman Nasional Komodo khususnya masyarakat lokal Desa Komodo yang masih hidup dalam kondisi miskin. Pada bagian lain, mereka juga telah melakukan demonstrasi agar mendesak pemerintah baik dipusat maupun didaerah agar segera melakukan pendataan terhadap hak milik masyarakat seperti tanah dan aset-aset lainnya untuk mendapatkan legalitas formal bagi masyarakat di Desa Komodo. Dengan melihat upaya masyarakat lokal inilah yang dimaksud dengan perlawanan (resistensi) terbuka yang dimana masyarakat lokal melakukan aksi bahwa dengan adanya sistem zonasi mengambil hak-hak asasi manusia terutama masyarakat lokal yang tinggal di Kawasan Taman Nasional Komodo.

Didalam pengelolaan ini juga masyarakat Desa Komodo dihambat oleh peraturan UNESCO dan *The Nature Conservancy* (TNC). Sejak Pulau Komodo menjadi Warisan Alam Dunia, pohon tidak bisa lagi dipotong oleh masyarakat lokal. Semula, masyarakat Desa Komodo makan bubur dari pohon sagu dan membangun rumahnya dari pohon-pohon yang ada dihutan tetapi semenjak adanya larangan tersebut mereka hanya bisa memakai kayu apung dan akibatnya keadaan rumah mereka semakin memburuk karena keterbatasan kayu dan aktivitas tradisional seperti pemburuan juga sudah dilarang. Selain itu, *The Nature Conservancy* mengawasi keras menggunakan metode pamancingan tradisional masyarakat Desa Komodo.

Kesulitan ini juga dialami secara langsung bagi mereka yang usahanya mengandalkan dan meramu hasil-hasil hutan, memanfaatkan kayu untuk kebutuhan sendiri atau untuk dijual kepada orang lain walaupun tidak seberapa jumlahnya tidak diperbolehkan lagi bahkan memungut ranting saja tidak bisa dilakukan oleh masyarakat dan dari instansi terkait hal ini dianggap akan melanggar hukum (illegal logging) dan ini cukup meresahkan bagi masyarakat lokal Desa Komodo ketika mereka tidak bisa melaut.

Adapun yang terjadi masalah penyempitan lahan di perkampungan masyarakat lokal Desa Komodo yang saat ini pihak dari Balai Taman Nasional Komodo meletakkan pilar-pilar di sekitar perkampungan Desa Komodo. Dahulu pilar-pilar ini terpatok sangat jauh dari perkampungan tetapi beriring waktu pilar tersebut semakin dekat dengan perkampungan masyarakat lokal yang artinya zona pemukiman masyarakat lokal setempat dipersempit. Namun dari ini semua ada semacam resistensi kesadaran dalam pikiran masyarakat dalam upaya mengatasinya, yakni mengangkut kayu dari hutan secara sengaja masyarakat lokal lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi pada malam hari, dengan alasan untuk menghindari para petugas razia dihutan atau diluar dari pemukiman penduduk. Pada masalah pematokan pilar-pilar yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Komodo juga mereka pindahkan jauh setiap kali pilar-pilar tersebut dekat dari perkampungan.

Masyarakat lokal yang melakukan ini, tentu saja telah memperhitungkan kendala-kendala dan segala resiko yang kemungkinan dihadapi di lapangan. Strategi dan aksi diam-diam dan aksi sengaja secara sembunyi-sembunyi adalah bentuk aksi perjuangan yang efektif dalam rangka untuk mempertahankan hidup sehingga tidak kehilangan sumber mata pencaharian bahkan area pemukiman mereka. Demikian juga, manakala, sumberdaya alam di sekitar mereka di eksploitasi secara besar-besaran oleh investor, dipandang merusak lingkungan atau *illegal mining*. Strategi untuk bertahan hidup dalam situasi yang demikian, masih akan terus dilakukan oleh warga, bahkan menjadi sebuah keharusan dan bukanlah pilihan, dan upaya ini akan terus berlangsung selama proses distribusi dan akses pengelolaan tanah dan sumberdaya laut maupun hutan itu masih dibiarkan saja dimonopoli oleh segelintir orang atau pihak-pihak tertentu.

Berbagai bentuk aksi dan gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat tidak lain merupakan sebagai bentuk pertarungan dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi kehidupan. Aksi-aksi ini mereka lakukan dalam situasi atau kondisi dengan dinamika hidup yang semakin sulit yang dialami oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang masih tetap menggantungkan sumber matapencaharaan utama pada sumberdaya laut, hutan dan sumberdaya alam sekitar.

Resistensi Berkaitan Ekonomi

Mayoritas masyarakat yang mendiami Desa Komodo berprofesi sebagai nelayan. Nelayan merupakan profesi yang diwariskan secara turun-menurun dalam kehidupan masyarakat Desa Komodo. Letak Desa Komodo yang berada di Pulau Komodo yang dikelilingi lautan menjadi faktor yang mendukung

masyarakat Desa Komodo sebagai nelayan. Tetapi dengan adanya Pariwisata Taman Nasional Komodo, masyarakat banyak yang beralih profesi menjadi pemahat patung atau pembuat *souvenir* patung komodo. Apalagi sejak ditetapkannya Kawasan Komodo menjadi Taman Nasional Komodo, ruang gerak masyarakat mulai berkurang terlebih kepada masyarakat yang masih berprofesi sebagai nelayan karena mereka harus menempuh jarak yang jauh keluar dari Kawasan Taman Nasional Komodo untuk mencari ikan dan ini akan beresiko tinggi menghadapi kerugian besar karena tingginya modal yang mereka gunakan. Seperti yang diceritakan oleh pemahat patung komodo tentang peralihan profesi masyarakat Komodo.

“Saat ini pekerjaan yang cukup aman yaitu menjadi pemahat patung komodo atau penjual *souvenir* karena berkerja sebagai nelayan sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ini menyebabkan sistem zonasi yang ditetapkan oleh Balai Taman Nasional Komodo membatasi ruang gerak masyarakat dan sekarang kalau masih menjadi nelayan harus pergi lebih jauh lagi dari Desa Komodo. Makanya banyak yang beralih profesi pada pariwisata” (Pemahat Patung, 25 Agustus 2022).

Pemahat patung atau pembuat *souvenir* patung Komodo mengaku, bahan baku pembuatan patung Komodo dan jenis *souvenir* lainnya seperti pohon waru laut yang dijadikan bahan pokoknya semakin berkurang. Pohon ini disebut memiliki struktur kayu yang lebih lunak dan mudah diolah menjadi bahan ukiran namun ketersediaan pohon jenis ini semakin berkurang dan sulit diperoleh. Selain dari laut, bahan baku yang sering dipakai untuk pembuatan patung yakni jati namun untuk mendapatkan kayu jati, para pematung harus mendatangkan dari luar kawasan Taman Nasional Komodo seperti Golo Mori di daratan Flores bagian barat. Kondisi ini membuat para pematung atau pembuat jenis *souvenir* lainnya menghadapi kesulitan tidak hanya untuk masa kini tetapi untuk masa mendatang.

Disamping mengalami kesulitan bahan baku, para pematung juga mengalami banyak kendala seperti masalah pemasaran hasil produk mereka. Kondisi ini disebabkan tidak banyak wisatawan yang berminat membeli patung Komodo sebagai cendramata. Pengusaha patung Komodo itu mengaku, pendapatan dari hasil jual *souvenir* belum mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Penjual *souvenir* di Taman Nasional Komodo ini memiliki penghasilan yang minim dan dengan penghasilan yang minim tersebut mereka akhirnya harus mencari cara lain dengan menjualkan *souvenir*nya dengan melakukan perjalanan sendiri menggunakan perahu ke tempat-tempat yang menjadi spot Taman Nasional Komodo meskipun bertemu dengan pengelola dan melarang penjualannya mereka tidak menghiraukan larangan tersebut dan tetap melakukan penjualan. Kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat lokal di Desa Komodo yakni keterbatasan lokasi penjualan *souvenir* yang selama ini hanya terpusat di Loh Liang (Pulau Komodo) sedangkan masih banyak lokasi yang bisa dijadikan tempat penjualan *souvenir* tetapi tempat obyek wisata lain sejauh ini belum diberi ijin oleh otoritas Taman Nasional Komodo untuk kegiatan berjualan dan hanya dipusatkan pada tempat yang sudah disediakan.

Dalam kegiatan pariwisata seharusnya masyarakat lebih dilibatkan sebagai pemandu wisata (*guide*), porter, penyewaan alat maupun penyediaan jasa travel. Tetapi pada kenyataannya masyarakat Desa Komodo hanya diberikan batas hanya sebagai penjual cinderamata dan pemahat patung komodo dan ketika ingin dijadikan pemandu wisata (*guide*) mereka harus memiliki sertifikat yang bermodal secara mandiri. Pada tahun 2014, masyarakat di Desa Komodo baru diberikan ijin oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo dengan membuat *homestay* di pemukiman masyarakat dan itu membuat masyarakat mempunyai sedikit harapan meningkatkan ekonominya walaupun sangat jarang wisatawan berkunjung ke desa setempat.

Selain masalah pada mata pencaharian masyarakat, masyarakat juga mendapatkan masalah pada program bantuan stimulan pembangunan perumahan rakyat atau proyek bedah rumah bagi penduduk Pulau Komodo. Ketidakakuratan data penduduk sasaran dan sulitnya mendapatkan material bangunan ikut memicu konflik sosial di lapangan. sejumlah warga lainnya mensinyalir adanya sejumlah ketimpangan dan atau penyimpangan berkaitan dengan program bantuan stimulan perumahan bagi warga masyarakat di wilayah itu. Selain itu rotes terhadap pemerintah juga dilakukan dengan cara mempertanyakan dan meminta pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menindaklanjuti informasi yang telah tersebar dengan kenaikan tarif tiket masuk ke Kawasan Taman Nasional Komodo harga tiket yang semula 200.000 mau dinaikkan menjadi 3.750.000 yang dengan jelas akan merugikan perekonomian masyarakat.

Dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan melakukan kenaikan harga tiket di Kawasan Taman Nasional Komodo membuat hal ini menjadi polemik karena akan berdampak pada ruang hidup masyarakat yang hampir sebagian besar berpangku pada wisata. Dengan itu mereka melakukan perlawanan terbuka yaitu dengan melakukan demonstrasi untuk meminta kejelasan dari pihak pembuat kebijakan terkait masalah ini. Pelawanan ini merupakan sebuah cara untuk bisa bertahan menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu penghidupannya.

Resistensi Berkaitan Sosial Budaya

Secara umum Ata Modo (Orang Komodo) memiliki hubungan antar sesamanya yang sangat dekat dengan keterkaitan emosional walaupun hubungannya bukan langsung sedarah namun mereka tergolong masyarakat homogen dan hidup sosial masyarakatnya sangat aman tidak ada pertikaian berdarah sepanjang sejarah. Sekitar tahun 1800-1900-an, Pulau Komodo dan sekitarnya diperkirakan sudah didiami oleh penduduk yang berasal dari berbagai suku di Indonesia seperti dari Sumbawa, Bima, Sumba, Sulawesi dan beberapa etnis atau suku di daratan Pulau Flores. Dahulu mereka hidup berpindah-pindah dan keberadaan mereka dapat dilihat dengan adanya kerbau, rusa, dan babi hutan yang sampai sekarang berkeliaran di sekitar wilayah Pulau Komodo. Binatang liar tersebut diperkirakan dibawa dari daratan Sumbawa, Bima, dan beberapa daerah lainnya. Selanjutnya, keberadaan mereka juga dapat dilihat dengan adanya perkuburan warga serta bekas kampung dan peninggalan bersejarah lainnya. Di Pulau Komodo ini mereka berburu binatang di hutan dan di Pulau Komodo ini juga menjadi tempat persinggahan para saudagar dari Sulawesi, Bima, dan Manggarai.

nenek moyang mereka membuka kebun, memelihara ternak dan menanam tanaman palawija dan melakukan perdagangan seperti kelapa. Di beberapa lokasi tersebut hingga kini masih ditemukan bekas perkampungan penduduk, tanaman perdagangan seperti kelapa, kedondong, merica, kunyit dan binatang peliharaan seperti kerbau. Kekayaan ini merupakan bukti bahwa masyarakat memiliki aset di kawasan ini. Aktivitas Orang Komodo berburu dan bercocok tanam ini berlangsung cukup lama dan dilakukan secara turun temurun. Menurut penuturan masyarakat lokal, pada umumnya binatang buruan mereka hanya rusa dan babi hutan. Hasil dari buruan mereka itu, sebagian dibawa pulang ke rumah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagian lainnya akan dibuang ke hutan untuk menjadi makanan Binatang Purba Komodo. Itu berarti bahwa Binatang Komodo dulunya biasa dikasih makan oleh penduduk setempat dan sama sekali tidak ada larangan memberi makan seperti yang diterapkan sekarang oleh pemerintah. Saat ini di Pulau Komodo ada larangan memberi makan kepada Binatang Komodo oleh pemerintah dan menurut masyarakat setempat sangat bertentangan dengan kebiasaan nenek moyang Orang Komodo. masyarakat menganggap tidak heran jika jumlah Binatang Komodo dari waktu ke waktu semakin berkurang karena harus berjuang sendiri mencari makanan.

Sejak kebiasaan berburu dan bercocok tanam yang merupakan rutinitas keseharian kaum pria Orang Komodo, perlahan-lahan beralih menjadi nelayan sejalan dengan ditetapkannya Kawasan Komodo sebagai Kawasan Konservasi Taman Nasional. Padahal, sebelum ditetapkan menjadi kawasan konservasi, masyarakat bebas mengelola lahan dan mengambil hasil hutan seperti madu, kayu api, buah gebang untuk diolah menjadi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Tahun 1926, Tim ekspedisi dari Amerika Serikat yang diketuai oleh Mr. Douglas Brugden datang melakukan penelitian tentang Komodo. Ia seorang peneliti dari Amerika dan menurut masyarakat Komodo, orang barat itu menangkap beberapa ekor dan dibawa ke Amerika untuk kepentingan penelitian tetapi sesampainya disana terdengar berita bahwa Binatang Komodo yang dibawa oleh orang barat tersebut mati semua. Semenjak itu masyarakat percaya hanya di Pulau Komodo binatang Komodo bisa hidup.

Melestarikan Binatang Komodo bisa dikatakan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan hidup masyarakat lokal Komodo. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan hidup masyarakat komodo sangat penting dilakukan agar Binatang Komodo itu tetap lestari dan selama ini Binatang Komodo dengan Masyarakat Komodo saling hidup berdampingan. Berdasarkan cerita turun temurun dari masyarakat lokal, mereka memiliki hubungan antara Masyarakat Komodo dengan Binatang Purba Komodo dan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Hubungan antara Masyarakat Komodo dengan Binatang Purba Komodo bukan sekedar hubungan ekologis semata melainkan lebih sebagai hubungan "*genealogis*" dalam ikatan persaudaraan sejati sebagai sesama saudara. Relasi yang sedemikian erat menyebabkan hubungan diantara Manusia Komodo dengan Binatang Komodo tidak saling bermusuhan satu sama lain. Dengan demikian, melakukan perlindungan kepada Binatang Komodo tidak boleh dipisahkan dengan melindungi manusia yang ada di Pulau Komodo.

Segala bentuk kegiatan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan ini masyarakat lokal anggap sebagai amanat dari nenek moyang Orang Komodo sendiri. Yakni amanat untuk menjaga, merawat dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada di kawasan itu. Amanat ini, masyarakat lokal sebut sebagai amanat nenek moyang Orang Komodo dan bukan karena program dari pemerintah. Sehingga tanpa pemerintah melakukan konservasi, Masyarakat Lokal Komodo mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara Binatang Komodo beserta habitatnya agar tetap terjaga kelestariannya.

Selama ini ada upaya dari pihak-pihak tertentu dalam hal ini pemerintah untuk memindahkan penduduk komodo bahkan binatang komodo itu sendiri. Tetapi dengan berbagai upaya tersebut ditolak oleh masyarakat dan tidak pernah berhasil dilaksanakan karena kebijakan pemerintah tersebut jelas bertentangan dengan eksistensi masyarakat Komodo dan binatang komodo. Penolakan pemindahan penduduk komodo dan belakangan bentuk penolakan yang sama terhadap pemindahan binatang komodo ini membuktikan

bahwa berbagai kebijakan pemerintah tersebut tidak direstui oleh nenek moyang komodo. Masyarakat mengatakan binatang komodo harus dijaga dan dipelihara oleh Orang Komodo sendiri dan pihak lain hanya ikut mendukung dalam menjaga dan melestarikan kawasan itu. Namun sayangnya, selama kawasan itu ditetapkan sebagai Taman Nasional, masyarakat setempat kurang diperhatikan kesejahteraannya bahkan hidup dalam tekanan dan ancaman.

Pembahasan

Setiap manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latarbelakang kebudayaan yang berbeda (Thomas et al., 2015). Jika masyarakat lokal mengalami kontradiksi dan memiliki pengalaman dramatis yang berkenaan dengan pemanfaatan lahan dan perubahan kebudayaannya maka masyarakat akan melakukan resistensi (perlawanan). Resistensi adalah semacam bentuk penolakan masyarakat lokal yang tidak mau tunduk dan taat pada aturan yang berlaku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori resistensi oleh Scott adalah suatu perlawanan yang dilakukan secara terang-terangan dan diam-diam atas suatu kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk perlawanan yang ditindas. Menurut Scott (2000), ada beberapa bentuk resistensi yang membagi tindakan resistensi menjadi dua bagian, perlawanan terbuka dan tertutup (sembunyi-sembunyi). Perlawanan terbuka adalah bentuk yang terselubung dari resistensi itu, misalnya terlihat dalam berbagai pertunjukan di atas pentas yang diibaratkan pemain teater yang harus hidup di dua dunia, yakni dunia nyata sehari-hari dan dunia “berpura-pura” di atas panggung. Sedangkan perlawanan tertutup (sembunyi-sembunyi) adalah bentuk resistensi yang dilakukan tersembunyi atau lebih tepatnya di “belakang”: pelaku resistensi berpura-pura bersikap baik di depan “lawannya” tetapi di “belakang” (atau ketika sedang berkumpul dengan temannya) mereka membicarakan “lawannya” itu, misalnya dengan cara bergosip, memfitnah, mengumpat, dan sebagainya.

Realita di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Scott (2000) bahwa akan selalu ada tindak bentuk resistensi (perlawanan) yang dilakukan kaum subordinat terhadap perilaku eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kuat. Dalam hal resistensi ini dilakukan agar masyarakat lokal bisa mempertahankan diri dari berbagai ancaman yang muncul dari lingkungan, ekonomi maupun sosial budayanya meskipun ini akan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kapitalis mulai menguasai pasar dengan membangkitkan terjadinya kelas-kelas dalam masyarakat seperti masyarakat yang memiliki modal maka akan dapat bertahan dan begitupun sebaliknya jika masyarakat tidak memiliki modal maka akan sulit membangun usahanya (Nindiananta, 2022). Akibatnya perlawanan muncul karena adanya norma-norma yang sudah diyakini dan akan selalu diperjuangkan. Gerakan protes yang dilakukan merupakan reaksi kolektif dari kedudukan rendah dan rentan terhadap ketidakadilan baik yang berhubungan dengan sosial, ekonomi maupun politik (Lansberger, 1981).

Terjadinya resistensi (Idhom, 2009), dapat diakibatkan oleh tiga faktor. Pertama, faktor sosio-psikologis yakni keadaan sosial yang mempengaruhi psikologis. Seperti halnya masyarakat lokal melakukan protes yang terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dialami oleh masyarakat lokal. Kedua, faktor sistem budaya yang sudah tidak sesuai lagi tatanan nilai dan norma yang telah terinternalisasi dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal. Ketiga, faktor struktural yakni adanya kondisi struktural (sosial politik) yang memungkinkan masyarakat lokal mempunyai ruang gerak dalam memanasifestasikan aspirasinya. Resistensi adalah lawan dari loyalitas (Amanda et al., 2021). Dengan adanya resistensi ini dapat diartikan sebagai hilangnya komitmen sebagai kunci utamanya dari loyalitas (Taylor et al., 2004).

Semenjak ditetapkannya Pulau Komodo sebagai Kawasan Taman Nasional Komodo ini bukanlah tanpa masalah, justru telah mendorong percepatan perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Keterkaitan dalam teori James Scott terhadap penelitian ini adalah bahwa resistensi yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap pengelolaan Taman Nasional Komodo adalah bentuk perlawanan mereka terhadap aturan yang tidak berpihak kepada mereka sebagai suatu kelompok sekaligus dengan cara mereka bertahan menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Masyarakat lokal Desa Komodo yang saat ini sudah banyak beralih sebagai pelaku usaha merespon regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan Kabupaten Manggarai Barat ketika regulasi tersebut dianggap tidak berpihak pada keberlanjutan kehidupan mereka. Resistensi ini bukan hanya sekedar bentuk perlawanan kepada kelompok kuat atau penguasa, tetapi ini juga sebagai strategi untuk tetap bertahan melanjutkan keberlangsungan kehidupannya keluar dari berbagai macam kesulitan dan ancaman.

Kesimpulan

Dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo menimbulkan polemik bagi masyarakat lokal Desa Komodo. Pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membuat aturan untuk melakukan sistem zonasi dan untuk konsevasi. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelestarian lingkungan yang ada di Taman Nasional Komodo. Dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo ini tidak dilakukan bentuk

musyawarah kepada masyarakat sebagai bagian dalam sistem zonasi dan aturan yang tiba-tiba diberlakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat, maka hal tersebut menimbulkan polemik bagi masyarakat Desa Komodo yang masih bermukim di Kawasan Taman Nasional Komodo. Oleh sebab itu, masyarakat lokal Desa Komodo melakukan perlawanan (resistensi) dengan cara: Pertama, memberikan teguran dan melakukan bentuk aspirasi terhadap pengelola Taman Nasional Komodo dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar menanggapi dan melakukan musyawarah terhadap keputusan yang berkaitan dengan Taman Nasional Komodo. Kedua, mensiasati pengelola Taman Nasional Komodo dengan cara tetap melakukan profesinya sebagai nelayan dan memasuki hutan dengan melewati area-area zonasi yang menjadi larangan dari pengelola Taman Nasional Komodo serta penjual souvenir tetap menjajakan jualan ditempat-tempat yang belum mendapat izin dari pihak pengelola. Resistensi yang dilakukan ini adalah bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap pengelola Taman Nasional Komodo sekaligus cara mereka bertahan dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi selama aturan tersebut merugikan bagi masyarakat lokal. Hasil penelitian masih terbatas pada pengelola Taman Nasional komodo, penelitian selanjutnya dapat melakukan riset dengan fokus pada resistensi masyarakat lokal terhadap travel wisata yang telah menjamur dan tidak melibatkan masyarakat lokal yang lebih mendalam lagi, sehingga memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat terkait resistensi yang ada.

Daftar Pustaka

- Amanda, I. E., Tumbuan, W. J. F. A., & Samadi, R. L. (2021). Pengaruh Nilai, Afektif, Kepercayaan, dan Resistensi untuk Beralih Terhadap Loyalitas Konsumen pada Objek Wisata Welu di Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat. *Jurnal EMBA*, 9(4), 264–273.
- Chakim, S., Basit, A., Ash-Shidiqy, M., Roja, A., & Zaman, B. (2021). Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya Resistensi Pengelolaan Wisata Religi di Makam Dalem Santri Kutaliman Banyumas. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(3), 388–398. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i3.12500>
- Fringka, Y. (2016). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 21(2), 205–231.
- Hironimus, Y. S., Rijanta, R., & Iskandar, D. A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Aktivitas Pariwisata di Taman Nasional Komodo terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Manggarai Barat. *REGION Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Patisipatif*, 14(2). <https://jurnal.uns.ac.id/region>
- Idhom, A. M. (2009). Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen Di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Universitas Borneo Tarakan.
- Idris, M. H., Selva, & Destari, R. (2019). Pengaruh Destinasi Pariwisata Pulau Komodo Terhadap Beberapa Aspek Pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. *JIAP*, 7(1), 56–68.
- Lansberger, H. A. (1981). *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muchlashin, A. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata Masyarakat Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(1), 33–46. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3614>
- Nindiananta, A. (2022). Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Oktavia, S., Azis, M. C. A., Putri, W. D., Hakim, I. L., & Zulfaidah. (2021). Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Pariwisata di Desa Tarumajaya bagi Masyarakat Setempat. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(34). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Rahmani, F. (2022). Tinjauan Yuridis Pengembangan Kawasan Pariwisata Amal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2023. Universitas Borneo Tarakan.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sopacoly, M. M. (2019). Menegaskan Kesakralan Waruga: Resistensi Masyarakat Minahasa terhadap Desakralisasi Situs Suci Atas Nama Pembangunan di Sulawesi Utara. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Suantika, W. (2015). Wayan Suantika Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013. *Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun VIII*, 1. <http://www.thefreelibrary.com/>

-
- Taylor, S. A., Goodwin, S., & Celuch, K. (2004). The importance of brand equity to customer loyalty. *Journal of Product & Brand Management*, 13(4), 217–227. <https://doi.org/10.1108/10610420410546934>
- Thomas, Sikwan, A., & Rahmaniah, Syf. E. (2015). Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Pt. Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. *Jurnal Tesis PMIS*, 2(1).
- Ziku, R. M. (2015). Partisipasi Masyarakat Desa Komodo Dalam Pengembangan Ekowisata Di Pulau Komodo. *JUMPA*, 2(1), 1–21.
- Zulmi, F. (2018). Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Universitas Islam Indonesia.